

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH

JENIS FORMULIR PENCALONAN ANGGOTA DPD DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

1. Model F-DPD : Surat pencalonan bakal calon Anggota DPD.
2. Model F1-DPD : Surat pernyataan memiliki sejumlah pendukung di provinsi dan tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah Kabupaten/Kota di provinsi tersebut
4. Model F2-DPD : Surat Pernyataan tentang status bakal calon Anggota DPD yang meliputi WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia serta Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
5. Model F3-DPD : Surat Pernyataan tentang status bakal calon Anggota DPD tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
6. Model F4-DPD : Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang berakhirnya masa menjalani pidana bagi bakal calon Anggota DPD yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
7. Model F5-DPD : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPD untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih sebagai Anggota DPD.
8. Model F6-DPD : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPD mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota

- POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya.
9. Model F7-DPD : Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon Anggota DPD dari kenggotaan KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPLN/KPPS/KPPSLN/Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwascam/Panwaslap.
10. Model F8-DPD : Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon Anggota DPD sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa
11. Model F9-DPD : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPD untuk tidak berpratik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPAT atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
12. Model F10-DPD : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPD untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.
13. Model F11-DPD : Surat Pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan.
14. Model F12-DPD : Daftar riwayat hidup bakal calon Anggota DPD.
15. Model F13-DPD : Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.
16. Model F14-DPD : Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual.
17. Model F15-DPD : Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual.
18. Model BC DPD : Daftar Calon Sementara Anggota DPD.
19. Model BC-1 DPD : Daftar Calon Tetap Anggota DPD.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH

PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN SAMPEL

1. Contoh data penduduk Provinsi dan dukungan pemilih paling sedikit :
 - a. Jika Provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan pemilih paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih.
 - b. Dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
2. Contoh Penyebaran dan alokasi pemilih tiap Kabupaten/Kota :
 - a. Suatu provinsi memiliki jumlah penduduk 1.500.000 orang dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 5 Kabupaten dan 2 Kota, maka penyebarannya paling sedikit adalah :
$$50\% \times 7 \text{ Kabupaten/Kota} = 3,5 \text{ dibulatkan menjadi } 4 \text{ Kabupaten/Kota}$$
 - b. Jika dukungan pemilih paling sedikit 2.000 pemilih, maka harus tersebar paling sedikit di 4 Kabupaten/Kota, dengan contoh alokasi sebagai berikut :
 - 1) Kabupaten A = 750 Pemilih
 - 2) Kabupaten B = 500 Pemilih
 - 3) Kabupaten C = 450 Pemilih
 - 4) Kota D = 300 Pemilih
3. Responden diambil secara acak 10% (sepuluh persen) dari dukungan pemilih di setiap kabupaten/kota :
 - a. Contoh jumlah populasi dukungan pemilih Kabupaten A adalah 750 pemilih, sehingga sampel 10% dari populasi adalah 75 pemilih.

Catatan :

Dalam hal pengambilan sampel secara acak sebesar 10 % (sepuluh persen) menghasilkan angka pecahan 0,5 atau lebih maka dilakukan pembulatan keatas.

- b. Dari daftar dukungan pemilih sebanyak 750 pemilih ditentukan sampel pertama secara acak yang akan menentukan pengambilan sampel berikutnya dengan cara melakukan pengundian nomor awal, dimana akan diundi nomor urut 1 sampai dengan nomor 20.
- c. Untuk menentukan sampel yang akan dicuplik berikutnya ditentukan berdasarkan interval tertentu dengan rumus yaitu :

$$\text{Interval sampel} = \frac{\text{Jumlah populasi}}{\text{Jumlah sampel}}$$

$$\text{Interval sampel} = \frac{750}{75}$$

$$\text{Interval sampel} = 10$$

4. Jika pada pencuplikan sampel pertama di dapat anggota pada list nomor tertentu yang melalui proses undian (misalnya 19), maka sampel berikutnya adalah kelipatan dari 10 yaitu pada nomor 29 dan seterusnya sampai diperoleh sejumlah 75 sampel.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

| |
|--------------------|
| MODEL F-DPD |
|--------------------|

Contoh :



SURAT PENCALONAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 mewakili daerah pemilihan Provinsi, bersama ini saya :

1. Nama lengkap :
calon
2. Tempat/tanggal :
lahir/umur
3. Jenis kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Agama :
6. Alamat tempat :
tinggal

mengajukan pendaftaran perseorangan bakal calon Anggota DPD dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan pemilih sebanyak
(.....), dan tersebar di
(.....) kabupaten/kota meliputi :

| NO | KABUPATEN/KOTA *) | JML DUKUNGAN PEMILIH |
|-----|-------------------|----------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| dst | | |

2. Pengajuan bakal calon anggota DPD tersebut, dilampiri :

- a. Daftar dukungan pemilih bakal calon yang disusun masing-masing untuk setiap kabupaten/kota, serta terinci untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana tercantum dalam formulir Model F1-DPD dan Lampiran Model F1-DPD.
- b. Surat Keterangan dan Surat Pernyataan guna pemenuhan syarat bakal calon sebagaimana tercantum dalam formulir Model F2-DPD sampai dengan Model F12-DPD.
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
- d. Bukti kelulusan pendidikan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, program Paket C atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- e. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dari Ketua PPS.
- f. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih *) yang dilampiri :
 - 1) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.
 - 2) surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
- g. Surat Keterangan dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit yang menerangkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani masing-masing bakal calon.
- h. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan kondisi bakal calon tidak terkena/bebas narkoba.
- i. Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia.
- j. Surat Keputusan Pemberhentian atau surat keterangan persetujuan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan

usaha milik daerah, Penyelenggara Pemilu, DKPP, Panitia Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- k. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai *softfile*.

Demikian surat pencalonan ini diajukan untuk memenuhi syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan yang telah dilegalisasi, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2013

Calon Yang bersangkutan,

Meterai

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH :

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya :

1. Warga Negara Republik Indonesia, umur..... (.....) tahun;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat menjalankan kewajiban agama;
3. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
4. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,
.....2013

Bakal Calon Yang Bersangkutan

Materai

(.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

| |
|---------------------|
| MODEL F3-DPD |
|---------------------|

CONTOH :



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : /..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih **).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,
.....2013

Bakal Calon Yang Bersangkutan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**) Bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan (Model F4-DPD).

CONTOH :

**SURAT KETERANGAN**

Lembaga Pemasyarakatan menerangkan bahwa :

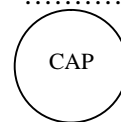
1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : /..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah dinyatakan bebas sejak tanggal

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,2013

Kepala Lembaga Pemasyarakatan



(.....)

Keterangan :

- *) Coret yang tidak diperlukan.
- ***) Bagi bakal calon yang tidak pernah dipidana penjara dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari bakal calon yang bersangkutan (Model F3-DPD).

CONTOH :

MODEL F5-DPD

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk bekerja sepenuh waktu, dan bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apapun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,2013

Bakal Calon Yang Bersangkutan

Materai

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

| |
|---------------------|
| MODEL F6-DPD |
|---------------------|

CONTOH :

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/badan lain*) yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara (APBN/APBD).

Surat pernyataan pengunduran diri saya ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian dan/atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/ lembaga atau unit kerja pada instansi/lembaga dimana saya diangkat bekerja.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam 12 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,2013

Bakal Calon Yang Bersangkutan

| |
|---------|
| Materai |
|---------|

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Formulir ini dipergunakan bagi bakal calon Anggota DPD yang berkedudukan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/badan lain.

CONTOH :

MODEL F7-DPD

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya mengundurkan diri dan tidak akan menarik pengunduran diri saya sebagai Anggota KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota/ PPK/ PPLN/ PPS/ KPPS/ KPPSLN/ Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwascam/Panwaslap*).

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian dan/atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

.....,2013

Bakal Calon Yang Berangkutan

Materai

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Formulir ini diperuntukkan bagi bakal calon Anggota DPD yang berkedudukan sebagai Anggota KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota/ PPK/ PPLN/ PPS/ KPPS/ KPPSLN/ Bawaslu/ Bawaslu Provinsi / Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwascam/Panwaslap.

CONTOH :

MODEL F8-DPD

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa*).

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian dan/atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

.....,2013

Bakal Calon Yang Bersangkutan

Materai

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Formulir ini diperuntukkan bagi bakal calon Anggota DPD yang berkedudukan sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa.

CONTOH :

MODEL F9-DPD

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : /..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara (APBN/APBD) serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,2013

Bakal Calon Yang Bersangkutan

Materai

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH :

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara (APBN/APBD).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,2013

Bakal Calon Yang Bersangkutan

Materai

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH :

MODEL F11-DPD



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : /..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya kesediaan saya untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota DPD dan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan yaitu Provinsi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n dan huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,2013

Bakal Calon Yang Bersangkutan

Materai

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH :



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON ANGGOTA DPD**

Pas Foto
Bakal calon
4 x 6

1. Daerah Pemilihan :
2. Nomor Induk Kependudukan :
3. Nama lengkap :
4. Tempat/tanggal lahir/Umur :
5. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
6. Agama :
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
 - a. Nama Istri/Suami *) :
 - b. Jumlah anak :
8. Alamat Tempat Tinggal :

RT/sebutan lain :

RW/sebutan lain :

Kelurahan/Desa*) :

Kecamatan/Distrik :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :
9. Riwayat pendidikan **) : a.

b. dst.....
10. Kursus/Diklat yang pernah diikuti : a.

b. dst

11. Riwayat organisasi***) : a.
b. dst
12. Riwayat pekerjaan *****) : a.
b. dst
13. Tanda penghargaan : a.
b. dst
14. Riwayat Perjuangan : a.
b. dst

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013. tentang Pencalonan **Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah** dan saya bersedia/tidak bersedia*) untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

.....,2013

Bakal Calon Yang Bersangkutan



(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. *****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/ lembaga// nama kesatuan dalam TNI/Polri,

CONTOH :



**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON ANGGOTA DPD**

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun dua ribu tiga belas, KPU Provinsi telah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPD atas nama dengan jumlah dukungan pemilih sebanyak (.....), dan tersebar di (.....) kabupaten/kota meliputi :

| NO | KABUPATEN/KOTA *) | JML DUKUNGAN PEMILIH |
|-----|-------------------|-------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| Dst | | |

kelengkapan administrasi yang diverifikasi meliputi :

1. surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD (Model F-DPD);
2. surat pernyataan memiliki sejumlah pendukung di provinsi yang bersangkutan dan tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut, dilampiri dengan daftar nama pendukung yang memuat tanda tangan dan/atau cap jempol jari tangan pendukung, serta fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing pendukung (Model F1-DPD)
3. surat pernyataan yang menyatakan bahwa status bakal calon adalah WNI yang telah genap berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia dan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (Model F2-DPD).

4. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau (Model F3-DPD).
5. surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, yang ditandatangani dengan tanda tangan asli/basah oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan serta cap basah (Model F4-DPD) yang dilampiri :
 - a. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.
 - b. surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang.
6. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model F5-DPD).
7. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model F6-DPD)
8. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan (Model F7-DPD)
9. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali bagi Kepala desa dan perangkat desa (Model F8-DPD)
10. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPATK atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (Model F9-DPD).

11. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model F10-DPD).
12. surat pernyataan kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan) (Model F11-DPD);
13. daftar riwayat hidup bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model F12-DPD).

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

| | | | |
|----|-------|----------------|-------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Anggota | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk bakal calon;
2. Satu rangkap Bawaslu Provinsi;
3. Satu rangkap arsip.

LAMPIRAN MODEL F13-DPD

CONTOH :



**LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRATIF
BAKAL CALON ANGGOTA DPD ATAS NAMA.....**

| NO | DOKUMEN YANG DIVERIFIKASI | STATUS*) | KETERANGAN*) |
|-----|---------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Model F-DPD | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 2. | Model F1-DPD | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 3. | Lampiran Model F1-DPD | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 4. | Model F2-DPD | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 5. | Model F3-DPD | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 6. | Model F4-DPD | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 7. | Model F5-DPD | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 8. | Model F6-DPD | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 9. | Model F7-DPD | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 10. | Model F8-DPD | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 11. | Model F9-DPD | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 12. | Model F10-DPD | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 13. | Model F11-DPD | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 14. | Model F12-DPD | ADA/TDK ADA | MS/TMS |

| | | | |
|-----|--|-------------|--------|
| 15. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri. | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 16. | Bukti kelulusan pendidikan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, program Paket C atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 17. | Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dari Ketua PPS. | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 18. | Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih *) | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 19. | Surat Keterangan dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit yang menerangkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani masing-masing bakal calon. | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 20. | Surat Keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan kondisi bakal calon tidak terkena/bebas narkoba. | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 21. | Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 22. | Surat Keputusan Pemberhentian atau surat keterangan persetujuan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Penyelenggara | ADA/TDK ADA | MS/TMS |

| | | | |
|-----|---|-------------|--------|
| | Pemilu, DKPP, Panitia Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa. | | |
| 23. | Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut. | ADA/TDK ADA | MS/TMS |
| 24. | Surat Keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang | ADA/TDK ADA | MS/TMS |

.....,.....

KPU PROVINSI

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

CONTOH :



**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
BAKAL CALON ANGGOTA DPD**

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun dua ribu tiga belas, KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi faktual bakal calon Anggota DPD atas nama dengan jumlah dukungan pemilih sebanyak (.....).

Verifikasi faktual dilakukan dengan cara mencocokkan nama-nama pendukung pemilih dengan nama-nama pendukung dalam softcopy yang berisi nomor induk kependudukan, tanggal/bulan/tahun lahir (umur), jenis kelamin, kelurahan, kecamatan dan tandatangan/cap jempol.

Hasil verifikasi terhadap nama-nama pendukung pemilih telah sesuai/tidak sesuai*) sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk bakal calon;
2. Satu rangkap Panwaslu Kabupaten/Kota*).....;
3. Satu rangkap arsip.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA*).....

- | | | | |
|----|-------|---------|-------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Anggota | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |

| |
|----------------------|
| MODEL F15-DPD |
|----------------------|

CONTOH :



**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL
BAKAL CALON ANGGOTA DPD**

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun dua ribu tiga belas, KPU Provinsi telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan faktual terhadap nama-nama Anggota DPD dengan rincian sebagai berikut :

Contoh :

| NO URUT | NAMA BAKAL CALON | PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN | JUMLAH DUKUNGAN PEMILIH MEMENUHI SYARAT | JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PEMILIH | HASIL |
|---------|------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | AAA | MS/TMS | 1.580 | 1.000 | MS |
| 2 | BBB | MS/TMS | 990 | 1.000 | TMS |
| 2 | Dst.... | | | | |

Demikian berita acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk KPU;
2. Satu rangkap untuk bakal calon;
3. Satu rangkap Bawaslu Provinsi*).....;
4. Satu rangkap arsip.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....

- | | | | |
|----|-------|----------------|-------|
| 1. | | Ketua | |
| 2. | | Anggota | |
| 3. | | Anggota | |
| 4. | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | |